

Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kelompok Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah

Abd. Hafid

HMI Cabang Gowa Raya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Correspondence author: abdhafid@gmail.com

Abstract. The economic cycle plummeted because of the C-19 pandemic outbreak, how then the working class people who are required to maintain health and break the chain of C-19 development at the same time are forced to work to continue their survival. How many workers because of this epidemic they are infected and then laid off, the pattern of social inequality is very clear in social life, where workers who are actually in the lower class category must continue to do work directly while the elites work in a relaxed and safe manner from their homes (WFH). Every day cases of C-19 infection increase the government's policy regarding large-scale social restrictions (PSBB) is considered very ineffective because it cannot answer the confusion caused by this system in other fields.) Things like this then contract the thinking of the working class to resist by not believing or not being afraid of the C-19 epidemic on the pretext of religion "death has been determined by God" and other justifications, therefore we as a society must really be aware of the dangers and handling of the outbreak.

Keywords: Covid 19; PHK; PSBB; Reality of workers

Abstrak. Siklus perekonomian sangat anjlok karena wabah pandemic C-19, bagaimana kemudian masyarakat kelas pekerja yang diharuskan menjaga kesehatan dan memutus rantai perkembangan C-19 dengan bersamaan mereka dipaksa bekerja untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Berapa banyak buruh karena wabah ini mereka terjangkit kemudian terkena PHK, pola ketimpangan sosial sudah sangat jelas pada kehidupan sosial kemasyarakatan, dimana para pekerja yang notabenehnya masuk dalam kategori kelas bawah harus terus melakukan pekerjaan secara langsung sementara para elit bekerja dengan santai dan aman dari rumah mereka (WFH. Setiap hari kasus terinfeksi C-19 kian bertambah kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar(PSBB) dinilai sangat tidak efektif karena tidak bisa menjawab kerancuan yang disebabkan oleh system ini di bidang lain.). Hal-hal yang seperti ini kemudian mengkontruk pemikiran kelas pekerja untuk melakukan resistensi dengan tidak percaya ataupun tidak takut pada wabah C-19 dengan dalih agama “ kematian sudah ditentukan oleh Tuhan” dan pembenaran-pembenaran lainnya, oleh karenanya kita sebagai masyarakat harus betul-betul sadar akan bahaya dan penanganan dari wabah tersebut.

Kata Kunci: Covid 19; PHK; PSBB; Kenyataan Kelas Bawah

PENDAHULUAN

Covid-19 mulai ramai diperbincangkan dunia akhir Desember 2019. Perbincangan ini tidak terlepas dari jumlah korban jiwa dan korban yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan Cina. Virolog WHO menyatakan SARS-CoV2-19 merupakan penyebab penyakit Covid-19. Mula-mula, virus ini bertumbuh di Wuhan, China, tetapi kemudian terus menyebar ke berbagai pelosok dunia termasuk Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan baik secara global, maupun nasional dalam mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran dari wabah ini. Secara nasional, ada berbagai upaya yang telah ditempuh, seperti kampanye gerakan **#stayathome**, social dan psychical distancing, dilarang mudik dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Di antara semua bentuk kebijakan yang diambil, kebijakan PSBB patut untuk kita amati bersama. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang muncul pada semua sektor kehidupan yang dialami manusia, seperti sosial-budaya, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Konsekuensi yang harus ditanggung akibat dari penerapan kebijakan PSBB. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 mengenai pedoman PSBB yang bertujuan untuk menangani penyebaran wabah COVID-19. PSBB merupakan pembatasan semua kegiatan masyarakat dalam satu teritori yang terduga telah atau berpotensi untuk terinfeksi Covid-19. PSBB bertujuan untuk memblokir dan mencegah penyebaran Covid-19 dalam skala yang lebih besar.

Dari sisi ekonomi, PSBB yang bertujuan untuk memutus penyebaran Covid19 menuntut hampir semua orang tidak berinteraksi di ruang publik. Konsekuensinya kegiatan ekonomi di hampir semua lini mengalami kemacetan. Yang paling segera merasakan dampak adalah industri pariwisata, sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga sektor jasa yang berhubungan dengan hospitality. Banyak industri yang merumahkan karyawan untuk sementara bahkan sampai pada pemutusan kerja, dan melepas karyawan kontrak. Implikasinya bahwa jumlah pengangguran dan orang miskin meningkat. Secara global, hanya dalam beberapa minggu sebagian besarnegara-negara di dunia telah menutup aktivitas ekonominya, dengan harapan dapat mencegah peningkatan jumlah korban kematian akibat Covid-19.

Pabrik-pabrik berhenti, restoran dan gerai belanja ditutup, dan angka pengangguran meroket di seluruh dunia. Tidak hanya itu, dampak resesi global juga telah terasa di negara-negara yang belum menerapkan karantina wilayah. Resesi global diperkirakan terjadi karena penurunan drastis permintaan dan perdagangan global.

Hari ini berapa banyak masyarakat yang berada pada kelas menengah kebawah yang tak lagi mempedulikan bahaya dari virus C-19, bagaimana tidak? Ketika mereka tidak melakukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan utama maka kebutuhan yang menjadi dasar dari keberlangsungan hidup tak akan bisa terpenuhi. Seseorang yang bekerja sebagai pemulung misalnya, ketika mereka tak keluar rumah maka konsekuensinya adalah mereka tidak mendapat penghasilan ini sangat berbeda dengan masyarakat yang bekerja disuatu instansi misalnya. Mereka yang berada pada satu instansi dapat melakukan pekerjaan dari rumah (WFH) secara daring dengan media yang ada. Maka sudah menjadi satu kewajiban ketika banyak dari masyarakat kelas bawah yang terinfeksi wabah tersebut. Mereka bukan tidak mau tinggal dan bersantai melakukan pekerjaan dari rumah, tapi tanpa keluar rumah mereka sama saja bunuh diri karena tak memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mempertahankan keberlangsungan hidup.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya studi pustaka, dimana penulis menelaah beberapa sumber pustaka sebagai referensi dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana penduduknya sebagian besar melakukan pekerjaan sebagai pengolah tanah, nelayan dan lain sebagainya. Disituasi pandemi seperti sekarang ini tak sedikit masyarakat yang bertaruh nyawa keluar dari rumah untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan banyak dari mereka yang tak takut terhadap wabah Covid 19.

Beragam kilah keagamaan, misalnya bahwa masyarakat tidak terkena dampak karena doa kunut dan mereka yang meninggal karena COVID-19

akan masuk surga Lebih jauh, penggunaan narasi-narasi keagamaan seperti ibadah, doa, surga, dan takdir untuk menutupi dampak pandemi sudah sangat sering kita temui didalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Fungsi praksis kegiatan konsumtif mirip fungsi praksis dari perilaku beragama, yakni penyedia justifikasi moral. Salah satu dilema terbesar dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih. Satu dari sekian banyak cara untuk meyakinkan bahwa pilihan yang kita ambil itu yang terbaik di antara pilihan lain adalah dengan memberikan justifikasi 'moral' terhadapnya. Agama telah menjadi salah satu sumber utama justifikasi ini dengan membenaran-pembenaran yang sifatnya transenden. Di sisi lain, konsumerisme juga menyediakan justifikasi materialistik. Di samping itu, lebih dari agama, konsumerisme juga cukup fleksibel: individu dimungkinkan untuk terus mengubah pilihan-pilihan selama sumber daya finansial masih tersedia. Konsumerisme memberikan ruang untuk mengoreksi pilihan melalui tindakan konsumtif berikutnya.

Hasil Penelitian

Banyak dari masyarakat keluar rumah karena hal tersebut yang dijadikan landasan, akan tetapi pada kondisi sebenarnya mereka terpaksa keluar rumah dan melakukan pekerjaan seperti biasa karena siklus kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhan dasar memang harus mencari nafkah secara langsung dan tidak memiliki instrument virtual seperti pegawai kantoran. Banyak dari jenis pekerjaan yang mereka lakoni selama ini tidak bisa melakukan aktivitas produktif ketika para pekerja tidak berada ditempat.

Petani, nelayan, buruh dan banyak lagi pekerjaan yang tak bisa dilakukan secara daring. Buruh misalnya Pada 4 April, enam orang buruh Grup Kahatex dikabarkan positif Covid-19. Pada 11 April, seorang buruh PT Denso Indonesia di Bekasi meninggal dengan status positif dan dua orang teman sekerjanya juga positif. Pada 14 April, satu orang buruh di perusahaan rokok Sampoerna meninggal dengan status positif. Tak berapa lama setelahnya, 100 buruh di pabrik yang sama positif ketika menjalani rapid test, dan 34 orang dari jumlah itu positif ketika menjalani tes lanjutan dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Pada 27 April, dua orang buruh PT EDS Manufacturing Indonesia (PEMI) dikabarkan meninggal dengan status pasien dalam pengawasan

(PDP). Pada 29 April, seorang buruh PT CCH Indonesia dinyatakan positif. Belum lama ini, 51 orang buruh PT Freeport dilaporkan terinfeksi.

Kasus buruh yang terinfeksi Covid-19 dan meninggal di atas hanya beberapa kasus yang diliput media. Dari informasi yang ada, awalnya para buruh terpapar virus di luar pabrik. Ketika belum muncul gejala yang serius, mereka masuk kerja dan kemungkinan besar menularkan virus ke teman sekerja mereka yang lain. Ini yang terjadi di PT Sampoerna. Dua orang buruh Sampoerna yang sudah meninggal dituduh tidak jujur oleh Walikota Surabaya karena tetap bekerja ketika mengidap gejala Covid-19.

Padahal masalahnya bukan tidak jujur, tapi dipaksa bekerja. Tidak ada keputusan untuk beristirahat di rumah. Jika buruh melakukan hal yang sebaliknya dari perintah manajemen, upah dan tunjangan akan disunat, dan status mereka menjadi rentan. Paksaan bekerja ini terjadi juga di Kahatex Grup dan PT Freeport. Saat beberapa buruh Kahatex terinfeksi, manajemen tidak meliburkan aktivitas produksi sama sekali, meski Wakil Bupati Sumedang telah meminta itu dilakukan. Mereka beralasan sudah memiliki kontrak kerja dengan buyer. Order produksi harus diselesaikan. Sementara jauh di dalam hutan Papua, manajemen Freeport tetap melanjutkan operasi menggali perut bumi dengan alasan menjaga berjalannya perekonomian.

Pabrik-pabrik di kawasan industri di Jakarta Utara, seperti Marunda, Priok, Cakung, masih melakukan aktivitas produksi. Buruh-buruh di perusahaan pemasok komponen otomotif dan elektronik di Karawang, Purwakarta, Bekasi, dan Batam setiap pagi berbaris masuk ke gerbang pabrik. Di kota dan kawasan industri lain, mesin-mesin belum dimatikan dan produksi tetap berlangsung. Hal yang sama juga dialami buruh di sektor jasa, retail, perbankan, dan perkantoran.

Meskipun buruh dipaksa bekerja, perusahaan tidak mengurangi jam kerja. Sebuah survei dilakukan pada April lalu oleh radio komunitas Marsinah FM dan Kelompok Belajar Buruh (Kobar). Responden yang diajak terlibat adalah buruh di Jabodetabek, Karawang, dan Jawa Tengah. Dari 146 responden, sebanyak 67,79 persen mengatakan masih bekerja. Dari angka itu, 47,25 persen bekerja seperti biasa

tanpa ada pengurangan jam kerja. 17,12 persen mendapat pengurangan jam kerja, dan 3,42 persen diperbanyak shift kerja untuk mencegah kerumunan.

Survei yang sama menemukan 25 persen lebih buruh bekerja tanpa disediakan APD oleh manajemen perusahaan. Buruh dibiarkan menyediakannya sendiri. Telah banyak buruh angkat suara bagaimana mereka merasa tidak merasa aman ketika menjalankan pekerjaan. Sebagian mengalami tekanan pikiran, membayangkan nyawa mereka terancam setiap kali memasuki area pabrik.

Keinginan buruh cukup jelas dalam menghadapi pandemi ini. Mereka ingin libur, tetap mendapatkan upah dan tidak dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini bukan keinginan yang muluk, tidak berdasar, atau egois sebagaimana yang sering dituduhkan. Konstitusi serta sejumlah undang-undang (UU) telah menjamin hak buruh dan pemerintah diwajibkan mematuhi. Bahwa jika satu penyakit menyebar dan dilakukan karantina wilayah, negara harus memberi makan rakyat. Jika terjadi guncangan pada ekonomi, negara menjamin terpenuhinya hak buruh dan mengawasi perusahaan agar tidak sembarangan membuang mereka seperti benda sekali pakai.

Buruh yang bekerja terutama pabrik dan di toko bisa sepenuhnya menjaga jarak. Durasi, ritme, dan beban kerja mengharuskan mereka acap berdekatan. Beberapa buruh dari berlainan tempat mengungkapkan, pada awalnya perusahaan mereka mengundang jurnalis, Disnaker, dan Kepolisian, ke acara yang kira-kira dinamakan, 'Putus Mata Rantai Covid-19 dari Tempat Kerja'. Ruang produksi, kantin, dan sudut-sudut lain diatur sedemikian rupa agar terlihat komitmen yang sungguh. Namun, maksimal tiga hari setelah acara ini dirayakan, situasi kembali brutal seperti biasa. Bersamaan dengan penyebaran virus, hal menakutkan lain tiba. Rangkaian gelombang besar PHK akibat krisis ekonomi yang dibawa pandemi, dengan daya rusak melebihi krisis moneter 1997-98 dan krisis global 2008, telah melanda kota-kota padat industri di Indonesia.

Banyak buruh formal dari berbagai sektor menunggu giliran untuk kehilangan pekerjaan. Tapi, selain peristiwa PHK yang berhubungan langsung dengan krisis ekonomi kali ini, terdapat juga peristiwa PHK rutin terhadap buruh yang mendekati habisnya masa kontrak kerja. Perusahaan padat karya seperti garmen, sepatu,

tekstil, dan yang lain mempekerjakan buruh dengan kontrak jangka pendek di bawah 2 tahun. Biasanya, mendekati bulan puasa atau lebaran, perusahaan memutus kontrak mereka lebih cepat agar bisa lari dari kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR).

Menurut data yang dikemukakan pada 30 April oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, jumlah buruh formal yang terkena dampak ekonomi pandemi mencapai 1,7 juta orang. Dari angka ini, 375 ribu buruh mengalami PHK, 1,4 juta buruh dirumahkan. Lebih dari puluhan ribu perusahaan terkena dampak Covid-19 dan kebanyakan terkonsentrasi di Jabodetabek. Sementara dari sektor informal, terdapat 314.833 buruh yang terkena dampak. Selain perdagangan asongan, bisa jadi buruh informal yang termasuk di sini adalah mereka yang bekerja di sektor formal tapi tidak memiliki status dan ikatan hukum apapun. Berlakunya pasar tenaga kerja fleksibel telah menciptakan apa yang disebut oleh pengkaji isu-isu perburuhan sebagai informalisasi sektor formal, seperti penggunaan buruh harian lepas, pekerja rumahan (home-based workers), dan sebagainya di rantai pasok sektor formal.

Jumlah buruh yang dirumahkan dan terkena PHK akan terus membengkak. Kemnaker, Disnaker tiap-tiap provinsi dan daerah, serta serikat buruh terus melakukan pendataan. Sebagai perbandingan, pada krisis global 2008 lalu, jumlah buruh di Indonesia yang mengalami PHK mencapai hampir 4 juta orang. Gelombang PHK dimulai dari Juli 2008 hingga Februari 2009. Menurut Fauzan A. Mahdami dkk. (2008), mereka yang kehilangan pekerjaan pada saat itu kebanyakan merupakan buruh dari sektor manufaktur dan perkebunan.

Kini situasinya berbeda. Enny Sri Hartati, Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), mengatakan jika krisis ekonomi yang dibawa Covid-19 menghantam semua negara dan sektor. Tidak mudah berkelit dari dampak buruknya. Sektor yang bertahun-tahun menjadi juru selamat di masa krisis, yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan informal akan sulit diandalkan sebagai pelampung ekonomi. Menimbang hal ini, berarti para buruh, petani, nelayan, pekerja rentan, dan rakyat dengan penghasilan rendah, terancam jatuh miskin. Rute migrasi untuk bertahan hidup, terutama bagi buruh formal adalah ketika terkena PHK, mereka akan masuk ke ekonomi informal. Namun karena penuh

sesak dengan pekerja informal yang sudah sedemikian banyaknya, ekonomi ini pelan-pelan kesulitan bernafas dan ambruk.

Riset terbaru SMERU Research Institute menunjukkan, jika memakai hitungan terburuk, jumlah orang miskin di Indonesia akan melonjak sebesar 8,5 juta jiwa pada krisis kali ini. Jika ditambah angka orang miskin dari Survei Ekonomi Nasional – Badan Pusat Statistik (Susenas BPS) pada September 2019 yang sebanyak 24,79 juta jiwa, itu berarti akan ada 33 juta orang miskin. Bahwa statistika dapat mengukur kemiskinan dan negara bisa melakukan rekayasa metode agar angkanya dikendalikan, itu bukan rahasia. Tetapi peristiwa orang terlempar dalam kolam kemiskinan tidak bisa direkayasa. Ia adalah pengalaman nyata dan dengan tepat menunjukkan siapa yang paling layak disalahkan.

Pada 20 April, seorang wanita bernama Yulie Nuramelia yang tinggal di Kota Serang, Banten, meninggal. Banyak media mengabarkan jika ibu empat orang anak itu meninggal karena kelaparan. Pemerintah Kota (Pemkot) Serang membantah dan mengatakan Yulie meninggal karena serangan jantung. Namun sebelum meninggal, dia menahan lapar selama dua hari. Keluarganya cuma menenangkan perut dengan minum air. Pandemi membuat mereka tidak memiliki pemasukan. Suami Yuli tidak lagi bekerja sebagai pengepul barang rongsokan. Bantuan pemkot tidak datang tepat waktu ketika keluarga ini butuh. Sementara kartu pra kerja tampaknya belum bisa mereka akses.

Bagaimana dengan hak-hak buruh yang terkena dampak ekonomi dari pandemi? Menurut Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), buruh yang dirumahkan harus diberi upah dan yang dikenai PHK harus diberi pesangon. Itu adalah kewajiban perusahaan dan memang begitulah aturan mainnya dalam hukum. Tapi para pengusaha, sebagaimana dikatakan Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), tidak akan membayar upah, pesangon, ataupun tunjangan hari raya (THR). Pengusaha mengeluh karena penurunan omset dan mengalami kerugian.

Karena itu secara bertahap buruh berstatus tetap dirumahkan, kemudian menunggu waktu PHK. Perlu dicatat bahwa tidak ada jaminan buruh yang berstatus dirumahkan tidak dikenai PHK. Pengalaman dari krisis ekonomi 1998 dan 2008

menunjukkan, ketika buruh dirumahkan—ada yang diberi upah hanya satu atau dua bulan, juga banyak yang tidak diberi upah—tidak lama kemudian mereka dikenai PHK tanpa pesangon.

Kerugian merupakan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab. Tapi semenjak keuangan perusahaan adalah hal suci yang tidak boleh diketahui serikat dan buruh, berapa persis jumlah kerugian hanya bisa ditebak. Jika dilihat lebih teliti, kerugian di sini lebih pada penurunan keuntungan dari operasi bisnis per tahun ini. Pada tahun sebelumnya mereka mengalami keuntungan. Kapal bisnis bisa saja tenggelam tapi orang yang memilikinya tidak demikian. Para pemilik perusahaan dan para manajer yang menimbun kekayaan dari kerja buruh, bisa bertahan hidup bertahun-tahun jika pandemi memang berlangsung selama itu. Mereka bisa membangun lagi kapal bisnis baru dengan pinjaman dari bank dan pemerintah. Sementara bagi buruh, tabungan dari upah murah hanya bisa dipakai paling lama 3 bulan.

Menaker Ida Fauziah pernah menganjurkan perusahaan untuk menempuh langkah lain tanpa melakukan PHK. Ia menyarankan perusahaan untuk mengurangi upah manajer dan direktur, mengurangi shift kerja, jam kerja, hari kerja, dan meliburkan pekerja secara bergilir. Ketimbang mengikuti pemerintah yang memang sama sekali tidak mereka anggap, perusahaan berlomba-lomba menabrak aturan hukum.

Pemerintah jelas kehilangan ketegasannya sebagai penegak hukum perburuhan. Ironis juga, mereka kehilangan auranya sebagai “bapak”. Ini merupakan peran dari sebuah mitos tentang hubungan industrial yang harmonis, yang dinamakan sebagai Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Mitos dan doktrinnya direproduksi, dari tingkat nasional hingga rukun tetangga (RT) di kawasan industri, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pada saat yang sama meredam tuntutan buruh. Namun ketika krisis terjadi doktrin ala HIP menguap dan keluarga harmonis hancur. Yang benar-benar muncul adalah pertentangan kelas yang selama ini justru ingin ditutupi. Salah satu pertentangan tersebut bisa dilihat ketika politisi dan pengusaha terus mendorong pembahasan RUU Cipta Kerja di

masa ini. Padahal banyak pihak telah protes dan menunjukkan kepentingan siapa yang diwakili RUU tersebut.

Untuk meredakan gejolak PHK dan memberikan pesan bahwa mereka berpihak pada rakyat, pemerintah mempercepat pelaksanaan kartu pra kerja dengan nilai anggaran sebesar Rp 20 triliun. Program ini menargetkan 5,6 juta orang sebagai penerima manfaat. Mereka termasuk buruh yang dikenai PHK dan warga negara di atas 18 tahun. Mereka akan dibayar sebesar Rp 3.550.000 per orang. Pembayaran ini terdiri atas biaya pelatihan dari sebesar Rp 1 juta, tunjangan bulan Rp 600 ribu selama 4 bulan, dan insentif survei Rp 150 ribu. Arus deras kritik telah diajukan atas penyelenggaraan program ini. Mulai dari indikasi nepotisme, korupsi, dan kesalahan pada desain serta target dari program kartu pra kerja.

Ketimbang melakukan perbaikan kebijakan, pemerintah jalan terus dengan cacat yang ada. Mereka membelokkan konteks dan tujuan suatu program yang sedianya diterapkan di situasi “normal”. Program kartu pra kerja dirancang sebelum pandemi dan dipersiapkan sebagai pelatihan bagi calon buruh. Sejalan dengan ini, beberapa tahun lalu pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan pemagangan nasional. Hasratnya adalah untuk meningkatkan “kualitas”, “standar” dan “skill” angkatan kerja Indonesia yang dianggap rendah. Dengan begitu, menurut mereka, pasar kerja menjadi lebih cerah dan produktif. Namun, di saat krisis dan kondisi darurat, ketika pasar kerja menciut dan dan satu-satunya skill yang disyaratkan adalah bertahan hidup, yang dibutuhkan adalah tersedianya uang tunai untuk membeli kebutuhan pokok.

Pemerintah negeri-negeri jiran –meski boleh jadi tidak lebih baik dari Indonesia dalam penanganan covid-19 dan krisis ekonomi–bertindak lebih cepat. Mereka mengambil pilihan karantina nasional ketika penyebaran virus mulai mengkhawatirkan. Itu dipilih dengan memberikan uang kepada masyarakat. Filipina membayar 8.000 peso atau setara Rp 2,5 juta per bulan kepada rumah tangga yang dikategorikan miskin. Sementara Malaysia membayar 1200 ringgit atau setara Rp 4.3 juta per bulan kepada buruh dan memberikan insentif kepada perusahaan. Pemerintah Malaysia dengan tegas melarang perusahaan yang mengakses insentif untuk melakukan PHK, cuti tanpa tanggungan (unpaid leave), dan memotong upah.

Banyaknya upaya penanganan yang coba dilakukan salah satunya PSBB. PSBB mungkin dipikirkan sebagai salah satu kebijakan yang paling ampuh untuk membatasi dan bahkan mengakhiri rantai penyebaran dari wabah Covid-19. Namun melihat kenyataan di lapangan, tampaknya tidak seperti yang dipikirkan. Jumlah kasus baru Covid-19 dan kematian terus mengalami peningkatan dari hari ke hari hingga saat ini. Tujuan utama dari PSBB adalah demi memutuskan rantai penyebaran wabah Covid-19, tetapi yang ditoreh dari kebijakan ini adalah yang sebaliknya. Selain tidak tercapainya tujuan utama, malah berakibat pada macetnya semua sektor kehidupan manusia sebagaimana telah digambarkan pada bagian sebelumnya. Inilah utopia yang dimaksudkan oleh penulis di balik penerapan PSBB.

Kebijakan PSBB sebagai salah satu dari sekian banyak pilihan kebijakan memang telah memberi konsekuensi positif dan negatif pada berbagai sektor kehidupan manusia. Positifnya bahwa PSBB telah menghambat transmisi virus corona yang sangat signifikan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi apabila kebijakan ini tidak diterapkan, kemungkinan akan terjadinya krisis yang melebihi hari ini. Kebijakan ini tentu membawa pengaruh negatif seperti yang dialami saat ini. Kebijakan ini mau tidak mau tetap menjadi opsi yang terbaik dalam ketersituasian kita sekarang ini. PSBB sebagai salah satu kebijakan terpaksa harus diambil berdasarkan pada pertimbangan objektif akan konsekuensi kejahatan (baca: keburukan) yang paling minimum. Dalam konteks ini, prinsip minus malum (pilihan yang paling sedikit nilai keburukannya) merupakan prinsip yang dinilai tepat dan kontekstual.

Menurut Patricia (dalam Aditya, 2020), biaya rapid test di rumah sakit Universitas Udayana Bali sekitar Rp350.000 dan biaya swab test mencapai sekitar Rp900.000. Masa aktif rapid test adalah tiga hari, sementara masa aktif swab test adalah tujuh hari (Aida, 2020). Biaya yang mahal atas surat keterangan negatif covid-19 dan masa aktif yang relatif cepat dinilai sangat menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian keluar kota. Biaya keluar kota jadi membengkak karena harus menjalani rangkaian test. Masyarakat harus memiliki uang lebih jika hendak bepergian keluar kota. Hal ini tentunya sangat memberatkan bagi para pekerja penglaju (commuter) yang harus bekerja di luar kota. Peraturan ini sangat

merugikan karena pekerja harus mengeluarkan biaya lebih agar bisa bekerja. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kemungkinan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) demi menaati kebijakan pemerintah dalam memutus rantai persebaran virus covid-19. Fakta - fakta tersebut menjadi motivasi masyarakat untuk menolak PSBB karena PSBB secara langsung mengurangi pendapatan para pekerja dan juga memiliki kemungkinan menghilangkan pekerjaan masyarakat.

Relasi antara struktur dengan agensi melalui fakta - fakta tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian. Struktur membuat kebijakan dengan sangat tegas, namun agensi tidak memiliki daya tawar atas kebijakan tersebut. Sebagai reaksi atas ketidaksesuaian ini, kesadaran agensi pun mendorong terjadinya resistensi kepada struktur. Dalam perkembangan relasi antara struktur dan agen, ternyata kesadaran agen dalam melakukan resistensi mampu mendorong struktur untuk melakukan perubahan. Bentuk perubahan yang terjadi adalah ketika pemerintah mulai melakukan transisi kebijakan PSBB menjadi kebijakan baru, yaitu kebijakan New Normal. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegagalan efektivitas kebijakan PSBB akibat penolakan agen yang menilai bahwa aturan tersebut sangat merugikan masyarakat.

Pembahasan

Setiap bencana, termasuk bencana wabah virus COVID-19 ini, memberikan kesempatan untuk dikaji dari berbagai aspek dan disiplin keilmuan serta menawarkan solusi kebijakan alternatif yang dapat saling melengkapi dan memperkuat untuk penanganan wabah virus tersebut di Indonesia. Dalam ranah ilmu sosial, berbagai aspek proses dan struktur sosial serta organisasi sosial dapat menjadi kajian dan opsi kebijakan tersendiri. Max Weber, salah satu pendiri ilmu sosial yang telah memberikan landasan kuat atau kerangka analisis menarik untuk melihat bencana wabah virus COVID-19 dari aspek ketidakseimbangan struktural (structured inequalities) terkait kelas, status, dan kekuasaan.

Liechty (2003) menegaskan bahwa analisis kelas terhadap fenomena sosial selalu jatuh pada salah satu pendekatan, yaitu antara struktural-deterministik (given) atau kultural-konstruktivis (processual). Weber sendiri telah memberikan kerangka analisis kelas yang banyak dijadikan referensi saat ini, dengan membagi

kelas menjadi tiga bagian yaitu bawah (lower class), menengah (middle class), dan atas (upper class) yang digambarkan secara proporsional dalam bentuk kurva segitiga.⁴ Kategorisasi kelas secara struktural pada umumnya merujuk pada basis perbedaan kekayaan atau pendapatan personal.⁵ Sebagaimana ciri khas negara berkembang, struktur sosial-ekonomi penduduk Indonesia masih didominasi oleh kelas bawah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mencapai 60 juta orang pada tahun 2019 dan dapat meningkat menjadi 85 juta orang pada tahun ini.⁶ Secara teoritis, jika merujuk pada kurva segitiga kelas sosial, jumlah kelas bawah bisa jadi hampir dua kali lipat dari angka tersebut. Bahkan menurut Bank Dunia (2020), komposisi dan proporsi kelas di Indonesia terdiri dari kelas bawah (79%), kelas menengah (20%) dan kelas atas (kurang dari 1%).

Virus COVID-19 dapat menyerang siapapun tanpa mempedulikan batas kelas sosial, suku, dan agama, namun masyarakat kelas bawah merupakan kelompok yang paling rentan dan beresiko. Cepat atau lambat, jika tidak ditangani dengan tepat dan efisien, virus ini akan menyasar secara masif masyarakat kelas bawah Indonesia yang merupakan mayoritas. Masyarakat kelas bawah lebih rentan karena tidak memiliki ketahanan sosial yang lebih baik. Masyarakat kelas bawah juga yang akan merasakan dampak terbesar ditambah jumlahnya yang dominan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi berkepanjangan jika merujuk pada masa trauma pasca bencana (post-disaster trauma). Akan tetapi, sejauh ini belum ada data-data yang menggambarkan variabel sosial-ekonomi para pasien yang terpapar virus COVID-19. Data resmi terkait DKI Jakarta sebagai provinsi yang paling banyak memiliki kasus positif COVID-19, dengan persentase sekitar 50% lebih banyak dari jumlah kasus di provinsi lainnya, hanya menggambarkan variabel gender dan usia para pasien.⁸ Pemerintah perlu mengetahui data ini untuk mengidentifikasi bantuan apa yang dapat didistribusikan dan kepada siapa bantuan tersebut diberikan untuk mengurangi beban ekonomi kelas-kelas tertentu dalam situasi pandemi ini.

Dari gambaran muram yang ada, banyak yang lekas mengambil kesimpulan jika serikat buruh tidak lagi relevan. Serikat dianggap bukan lagi menjadi satu-

satunya kendaraan menuju kesejahteraan buruh, ketika semua orang merasa dapat melakukan negosiasi dengan majikan. Pasar kerja yang meluas ke sektor jasa, industri kreatif dan *gig economy*, memunculkan buruh-buruh yang tidak betah dengan organisasi yang terlalu kaku. Padahal, dengan semakin meluasnya ekonomi neoliberal dan kian fleksibelnya pasar kerja, serikat lebih dibutuhkan dari hari ke hari. “Serikat buruh”, tulis Luce, “adalah satu-satunya institusi yang mampu memperbaiki ketidakseimbangan (ketimpangan) dalam ekonomi dunia saat ini.”

Sistem ekonomi yang berlaku akan terus berkontribusi pada mendalamnya ketimpangan. Faktanya, terdapat ketimpangan yang nyata antara produktivitas buruh dan upah yang diterima di Indonesia. Buruh produktif tapi miskin, sementara pengusaha semakin kaya. Siapa yang mampu menekan ketimpangan ini? Bukan pemerintah atau pengusaha. Serikat yang melakukannya. Patut dicatat, aksi-aksi protes serikat buruh pada tahun 2012-2013 berhasil menaikkan upah pada tahun berikutnya mencapai 50 persen (Mufakhir, 2017:266). Ini merupakan capaian yang penting (bukan soal nominal, tetapi soal kekuatan mobilisasi) sejak zaman Soeharto. Kenaikan upah saat itu dimungkinkan karena serikat memiliki kekuatan yang besar untuk menekan pemerintah dalam hal kebijakan.

Lalu, di mana peran serikat di masa pandemi ini? Dalam respon yang bersifat jangka pendek, serikat telah melakukan negosiasi dengan manajemen pabrik untuk tidak melakukan PHK dan pemotongan upah, menyusun data pembandingan terkait buruh yang masih dipaksa bekerja dan yang terkena PHK, mendistribusikan dana serikat dan logistik untuk membantu anggota, mendorong pembentukan dapur umum di beberapa pemukiman padat buruh, serta mendorong anggota untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan yang paling minimal. Di beberapa negara lain, respon jangka pendek serikat juga kurang lebih sama. Mereka melakukan pendataan, menekan pengusaha untuk tidak melakukan PHK, dan memastikan bahwa buruh memiliki akses pada program pembayaran uang tunai dari pemerintah.

Terkait dengan program kartu pra kerja yang telah diluncurkan, serikat perlu berperan lebih aktif. Banyak buruh yang sudah dikenai PHK kesulitan mengakses program kartu pra kerja karena perkara teknis yang bodoh seperti website sulit

diakses dan konfirmasi sistem yang melebihi deadline. Data dari serikat juga perlu diajukan sebagai pembandingan kepada pemerintah. Ini untuk menandingi data pemerintah yang memiliki banyak kekeliruan dan bahkan untuk membetulkannya, mereka harus melewati panjangnya rantai birokrasi yang mereka buat sendiri. Kekeliruan yang sulit diperbarui membuat program tersebut semakin mubazir.

Dalam respon jangka panjang untuk membangun kekuatan pasca krisis, kita belum tahu apa yang akan dilakukan serikat di tengah keterbatasan yang ada. Ketika melakukan analisis bagaimana serikat-serikat buruh di Indonesia dihantam krisis global 2008 dan bagaimana pula mereka memilih strategi membangun kekuatan pasca krisis, Mahdami dkk. mengatakan, serikat harus mulai serius memikirkan basis keanggotaannya yang tidak hanya bertumpu pada pekerja tetap dan pekerja di sektor formal. Krisis yang menghantam pekerja tetap dan pekerja di sektor formal, jelas membuat serikat goyah sebab disitulah tumpuan utama kekuatannya.

Refleksi untuk membangun lagi kekuatan dimulai dengan banyak hal yang sebagian telah diperbincangkan dalam gerakan buruh sendiri; mengorganisir buruh informal, keluarga buruh, buruh migran di luar dan buruh “asing” di dalam, buruh perempuan; memikirkan ulang bentuk dan kelembagaan serikat; mengorganisir melalui jaringan rantai pasok (*supply chain*); merubah sistem pendidikan internal yang lebih menggunakan penalaran kritis ketimbang slogan; memberikan kesempatan kepada anak muda menjadi pemimpin serikat; mendirikan koperasi buruh; memikirkan ulang strategi pemogokan dan pendudukan pabrik; membangun aliansi dengan gerakan sosial yang lebih luas.

Kekuatan baru yang dibangun nantinya mampu melindungi buruh dari upaya menjadikan mereka sebagai tumbal di pandemi dan krisis berikutnya

KESIMPULAN

Memahami realitas ekonomi politik tersebut bukan berarti kita sebagai warga negara cukup pasrah saja dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Memahami bahwa negara bukanlah institusi yang netral dan berisi konflik kepentingan membuat kita perlu mengupayakan setidaknya tiga hal.

Pertama, kita harus berhenti bersikap naif dengan mengandalkan elite politik dan negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan publik ini. Masyarakat harus membangun inisiatif perlindungan kesehatan masyarakat secara mandiri dengan semangat gotong royong.

Jika elite politik tidak mau mengalokasikan penerimaan pajak yang dibayarkan warga untuk membiayai hidup warga yang terdampak oleh upaya pencegahan penyebaran coronavirus ini, kita harus bahu membahu membangun jaring pengaman sosial berbasis lokal.

Kedua, kita harus terus menekan para elite politik untuk mengambil tanggung jawab mereka karena kepentingan mereka pun akan terdampak kalau pandemi ini semakin parah. Inisiatif publik untuk turut menanggulangi COVID-19 ini tidak boleh membuat negara lepas tangan. Masyarakat harus terus mendesak para elite politik menggunakan berbagai mekanisme yang memungkinkan. Catat dan umumkan kebijakan-kebijakan buruk serta mereka yang memutuskannya. Beri apresiasi kebijakan-kebijakan yang baik.

Ketiga, rakyat dan masyarakat sipil harus mengkonsolidasikan diri dengan kokoh supaya kepentingan publik dapat lebih tercerminkan di dalam negara, saat pandemi dan setelah pandemi ini berakhir nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Nicholas Ryan. (2020). Berapa Biaya Naik Pesawat dan Tes Covid-19 Selama Pandemi?. Diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2020/06/24/140500227/berapa-biaya-naik-pesawatdan-tes-covid-19-selama-pandemi?page=all>.
- Aida, Nur Rohmi Aida. (2020). Melakukan Perjalanan, Bawa Hasil Rapid Test, Swab Test, atau Surat Bebas Influenza?. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/11/121800765/melakukan-perjalananbawa-hasil-rapid-test-swab-test-atau-surat-bebas?page=all>.
- Ashaf, A. F. (2006). Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens Sebagai Alternatif. Diakses dari <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v8i2.5371>.

- CNN Indonesia. (2020). 81 Persen Masyarakat Disebut Ingin Segera Akhiri PSBB. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200520164939-20-505411/81-persenmasyarakat-disebut-ingin-segera-akhiri-psbb>
- Dwiramadi, F. (2020, 23 April). Tiga salah kaprah penerapan PSBB di Indonesia dan solusinya. THE CONVERSATION. Diakses dari <https://theconversation.com/tiga-salah-kaprah-penerapan-psbb-di-indonesia-dansolusinya-136247>.
- Gunia, A. (2020, 28 April). Why New Zealand's Coronavirus Elimination Strategy Is Unlikely to Work in Most Other Places. Diakses dari <https://time.com/5824042/new-zealandcoronavirus-elimination/>.
- Lomba Esai Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis BEM USD 2020: Kuliah Dalam Jaringan dan Penanganan COVID-19
- Hayat, N. (2020). COVID-19: Apa yang Membuat Kegagalan Komunikasi Pemerintah? Diakses dari <https://www.remotivi.or.id/amatan/586/covid-19-apa-yang-membuatkegagalan-komunikasi-pemerintah>.
- Hanapi, S. R. R., & Nur, A. (2020). Budaya Konsumerisme dan Kehidupan Modern; Menelaah Gaya Hidup Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 42-49.
- Jelita, Insi Nantika. (2020). Boleh Keluar Kota di Saat PSBB Tapi Ada Syaratnya. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/311902-boleh-keluar-kota-di-saat-psbb-tapiada-syaratnya>.
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Alwi, A. M. S. (2020). Strategi Komunikasi Pembelajaran Di Rumah Dalam Lingkungan Keluarga Masa Pandemi. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(02), 231-241.
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Delukman, D. (2021). The Final Destination's uncomfortable vision to the environmental ethics. *Journal of Advanced English Studies*, 4(2), 76-82.
- Mohammad Hasan Ansori, "Consumerism and the emergence of new middle class in globalizing Indonesia", *Exploration: Journal of Southeast Asian Studies*, The University of Hawaii, vol. 9, spring 2009. Diakses dari <https://scholarspace>.
- Mashabi, Sania. (2020). Ahli Sebut Indonesia Tengah Berjalan Menuju Puncak Kurva Pandemi Covid-19. Diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/09/11510381/ahli-sebut-indonesia-tengahberjalan-menuju-puncak-kurva-pandemi-covid-19>.

- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Nur, A. (2020). Mistisisme tradisi mappadendang di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 1-16.
- Nur, A. (2020). Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern.
- Purnamasari, Deti Mega. (2020). Survei: Sebagian Besar Warga Menolak PSBB karena Sulit Cari Nafkah. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/13541671/survei-sebagian-besarwarga-menolak-psbb-karena-sulit-cari-nafkah>.
- Sakti, R. E. (2020). Tantangan Kebijakan PSBB di Indonesia. Diakses dari https://kompas.id/baca/riset/2020/05/05/tantangan-kebijakan-psbb-diindonesia/?_t=7dZw46OAJf8JglQrRsPCDzzKtH5EMoRK45wORTJS4LFqugWeXGFAzAfzLU4Rg9.
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.

Stevens, H. (2020). Why outbreaks like coronavirus spread exponentially, and how to “flatten the curve”. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/>.

West, R. dan Turner, L. H. (2010). *Introducing Communication Theory and Application* (4th ed.). Avenue of the Americas, New York: McGraw Hill